

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Youtube dalam memberikan tanggung jawab bagi film yang di *spoiler* melalui *channel* Youtube telah melaksanakannya dengan sangat baik. Terdapat beberapa fitur pada Youtube yang dapat membantu pencipta film untuk melakukan *take down* terhadap cuplikan film mereka yang tersebar melalui platform Youtube. Seperti adanya akses ke alat pengelolaan hak cipta yang berguna bagi pencipta untuk melindungi dan mengelola konten mereka yang tersebar di Youtube. Beberapa alat pengelolaan hak cipta ini diantaranya ada formulir penghapusan pelanggaran hak cipta, *copyright match tool*, program verifikasi konten, dan Content ID.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi film yang di *spoiler* melalui *channel* Youtube menerapkan dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun upaya preventif yang pemerintah lakukan untuk melindungi hak tersebut adalah dengan disahkannya peraturan yang memfasilitasi perlindungan terhadap pemegang hak cipta film KKN Desa Penari, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu pemerintah juga mengatur perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta film KKN Desa Penari melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informastika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Sementara pada perlindungan hukum represif, pemerintah menyediakan tiga upaya untuk menyelesaikan perselisihan mengenai sengketa hak cipta yang terkandung di Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Upaya ini antara lain alternatif penyelesaian di luar pengadilan, arbitrase, dan melalui litigasi. Upaya litigasi dapat diajukan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atau pidana melalui pengadilan niaga.

B. SARAN

1. Bagi Youtube, dengan masih beredarnya video dari *channel* Youtube Sulton Fandy Akhmad dan AF horor, hal ini menandakan bahwa masih terdapat konten yang seharusnya di *take down* tetapi masih tetap ditayangkan oleh pihak Youtube. Dengan ini, Youtube harus menerapkan kebijakan yang dimilikinya secara tegas serta melakukan filterisasi dengan lebih optimal agar video yang dapat merugikan ini tidak tersebar secara luas melalui Youtube.
2. Bagi Pemerintah, ada baiknya pemerintah mulai membentuk Satuan Tugas yang bergerak khusus untuk mengatasi pembajakan. Baik itu pembajakan film, musik, buku, dan lainnya. Pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai platform media sosial dan penyedia layanan OTT untuk memudahkan laporan mengenai pembajakan hak cipta. Selain itu pemerintah juga dapat memaksimalkan fungsi pengawasan di berbagai platform digital. Karena dengan masih aktifnya konten *spoiler* di Youtube Sulton Fandy Akhmad dan AF Horor, menandakan pemerintah belum ada tindakan untuk menutup akses konten tersebut.